

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk dikaji pada organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, setelah ditetapkannya penganggaran yang berbasis kinerja, seluruh pemerintah daerah dituntut agar mampu untuk menghasilkan suatu kinerja keuangan pemerintahnya dengan baik. Semakin tingginya suatu tuntutan pelaksanaan dalam akuntabilitas publik, baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah, suatu unit kerja pemerintah, departemen serta lembaga negara diharapkan untuk bisa mengatasi adanya suatu pemborosan, kebocoran dana juga mendeteksi adanya suatu program yang dianggap tidak layak secara ekonomi (Liando, 2014).

Untuk menilai suatu akuntabilitas organisasi, yang bisa menghasilkan suatu pelayanan publik yang baik dan tepat sasaran diperlukan adanya pengukuran kinerja pemerintahan. Suatu ukuran kinerja diharapkan bisa membantu suatu pemerintahan untuk berfokus pada tujuan dan juga sasaran pada suatu program unit kerja. Terciptanya pengelolaan anggaran yang baik, tidak terlepas dari adanya suatu pengawasan yang telah dilakukan oleh atasan langsung pengguna anggaran, lembaga legislatif serta lembaga pengawas khusus yang ikut bertugas mengontrol suatu proses perencanaan dan juga pengendalian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Tolak ukur dalam suatu pengukuran kinerja pada sektor publik adalah dengan menggunakan konsep *value for money* yaitu meliputi penilaian ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Efektivitas dan efisiensi anggaran belanja merupakan salah satu prinsip dalam penyelenggaraan anggaran suatu organisasi, untuk dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal. Indikator kinerja dalam suatu organisasi yang menggunakan *value for money* seharusnya menggambarkan suatu pencapaian tingkat pelayanan pada biaya ekonomi yang terbaik (Bastian, 2001).

Menurut Mardiasmo (2002), konsep *value for money* merupakan inti dari suatu pengukuran kinerja dalam organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak hanya dinilai dari satu sisi output yang dihasilkan, tetapi juga harus mempertimbangkan input, output, serta outcome secara bersamaan.

Prinsip dalam *Value For Money* pada pengukuran kinerja juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam melaksanakan suatu mekanisme manajemen pemerintahannya yang bertumpu pada perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang baik. Masyarakat membutuhkan adanya pelayanan publik yang lebih baik dengan adanya keseimbangan suatu kekuasaan yang dimiliki dengan (akuntabilitas) tanggung jawab yang diberikan kepada masyarakat yang dilayani (Sari, 2014).

Hasil dari penelitian Sari (2014) mengatakan pengukuran rasio ekonomis pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep menunjukkan kinerja pemerintah daerah berada pada katagori ekonomis, sedangkan secara perhitungan efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep berada pada kategori efisien. Dan secara

perhitungan rasio efektifitas kinerja pemerintah Kabupaten Sumenep berada pada kategori efektif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja suatu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep periode tahun 2010-2013 yang dilakukan dengan menggunakan prinsip konsep *value for money* adalah baik, karena hasil perhitungan rasionya dari tahun ke tahun cenderung berada pada katagori ekonomis, efisien dan efektif.

Kabupaten Kudus adalah suatu kabupaten yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016 menyatakan pada Kabupaten Kudus terdapat sekitar 12.881 unit suatu perusahaan industri usaha yang tersebar. Jumlah itu juga mencakup seluruh perusahaan yang ada di Kudus baik industri yang besar atau sedang maupun industri kecil atau rumah tangga. Menurut data yang didapatkan dari BPS tercatat pada suatu perusahaan industri baik besar maupun sedang yang ada adalah sejumlah 177 jumlah perusahaan yang menarik sebanyak 98.203 tenaga kerja. Dengan perusahaan industri tembakau yang berada pada angka 34,46% dan diikuti industri pakaian sebesar 19,77% , lalu industri makanan dan juga minuman sebesar 2,22%.

Anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) Kabupaten Kudus merupakan suatu target keuangan tahunan pada pemerintah daerah yang merupakan persetujuan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Nilai realisasi dari pendapatan daerah pemerintah kabupaten kudus pada saat tahun 2016 terhitung sebesar 1.893,57milyar rupiah dengan yang dianggarkan dari sejumlah 2.027,01milyar rupiah. Sejumlah dana pendapatan yang telah diterima tersebut dipergunakan

untuk keperluan belanja daerah yang realisasinya mencapai sejumlah 2.139,51milyar rupiah dari total yang dianggarkan sejumlah 2.454,12 milyar rupiah.

Pada tahun 2013 realisasi anggaran pendapatan pada daerah kabupaten kudos adalah sebesar Rp.1.386.183.084.659 tahun 2014 naik sebesar Rp. 1.610.237.157.941, tahun 2015 naik sebesar Rp. 1.759.781.233.001, tahun 2016 naik sebesar Rp.1.880.999.970.784 dan pada tahun 2017 naik sebesar Rp. 1.983.213.078.247. Jumlah anggaran pendapatan yang besar pada Kabupaten Kudus memudahkan penyediaan anggaran belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Pada tahun 2017, anggaran belanja daerah sebesar Rp. 1.983.213.078.247 dengan komposisi belanja tidak langsung sebesar Rp. 806.181.215.000 dan belanja langsung sejumlah Rp. 501.486543.000.

Dengan demikian pelaksanaan APBD pada Kabupaten Kudus dituntut untuk lebih memperhatikan suatu disiplin anggaran, baik pada waktu akan dimulainya pelaksanaan hingga sampai pada titik akhir masa pelaksanaan tersebut. Suatu disiplin anggaran adalah cara yang digunakan untuk mengontrol adanya suatu pencairan anggaran yang terjadi serta suatu penyelesaian tujuan yang akan dicapai sesuai pada target yang telah ditentukan. Suatu pengelolaan APBD harus dilakukan dengan target yang baik agar sesuai pada anggaran kas dan juga waktu pelaksanaanya untuk dapat melaksanakan tugas suatu pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik dengan ekonomis, efisiensi dan efektifitas.

Dengan melihat fakta yang ada dan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah**

**Daerah dengan menggunakan Prinsip *Value For Money*** (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Kudus Periode 2013-2017). Studi ini bermaksud mengukur kinerja keuangan sektor publik pada Pemerintah Kabupaten Kudus dengan menggunakan konsep *value for money* yang di fokuskan pada ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

## **1.2 Ruang Lingkup**

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan permasalahan hanya sebatas Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Konsep *Value For Money* selama kurun waktu lima tahun yang dilihat dari Laporan Realisasi APBD Kabupaten Kudus periode 2013-2017.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus jika diukur dengan menggunakan elemen ekonomi?
2. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus jika diukur dengan menggunakan elemen efisiensi?
3. Bagaimanakah kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus jika diukur dengan menggunakan elemen efektivitas?

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus diukur dengan menggunakan elemen ekonomi?
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus diukur dengan menggunakan elemen efisiensi?
3. Untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus diukur dengan menggunakan elemen efektivitas?

## 1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi pembaca maupun peneliti, khususnya mengenai kinerja keuangan dalam pengukuran *value for money*.

### b. Manfaat Praktis

#### 1. Bagi penulis

Menambah wawasan dan juga pengetahuan mengenai Pengukuran analisis Kinerja Keuangan.

#### 2. Bagi Perusahaan/Objek yang Diteliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan untuk dijadikan tolak ukur untuk menilai mengenai pengukuran kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sehingga dalam melaksanakan program maupun kegiatan dapat berjalan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

#### 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi atau acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya, sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih baik.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini menguraikan teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini, seperti kajian pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta teori-teori dan pemikiran ahli yang mendukung pembahasan masalah dalam penelitian.

### **BAB III : Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan secara singkat mengenai variabel penelitian, jenis dan sumber data, populasi jumlah sampel dan teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan data , dan metode analisis data.

### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini menerangkan secara singkat mengenai objek penelitian, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, deskripsi variabel, analisis data dan pembahasan.

### **BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini menggambarkan tentang kesimpulan atas pembahasan masalah serta saran-saran yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus berdasarkan hasil penelitian ini.

